



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Jl. Jenderal A. Yani Kav-58 By pass Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat
J A K A R T A P U S A T

Jakarta, 19 Agustus 2019.

Nomor : 837/DJU/HK00.1/8/2019
Lamp : 1 (satu) berkas
Hal : Penelitian Kepatuhan Hukum pada Tahun 2019.

Yth : 1. Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu
2. Ketua Pengadilan Tinggi Jambi
3. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang
4. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang
5. Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
6. Ketua Pengadilan Tinggi Mataram
7. Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo
8. Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura
9. Ketua Pengadilan Tinggi Palu
10. Ketua Pengadilan Tinggi Kendari
11. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak
di-
Tempat.

Menindaklanjuti disposisi Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 12 Agustus 2019 atas surat dari Ombudsman Republik Indonesia Nomor B/2/2/PC.01.02/VIII/2019 tanggal 6 Agustus 2019 hal Penelitian Kepatuhan Hukum pada tahun 2019, terkait kepatuhan terhadap ketentuan administratif teknis dalam penyelesaian proses peradilan pidana (termasuk di dalamnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu), maka dengan ini diperintahkan kepada seluruh Ketua Pengadilan Tinggi yang ditunjuk untuk memonitor pengadilan negeri-pengadilan negeri di wilayah hukum masing-masing agar mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk penelitian hukum Ombudsman Republik Indonesia yang akan dilakukan pada **September – November 2019** tersebut (surat terlampir).

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM,



HERRI SWANTORO

Tembusan disampaikan kepada yth.:

1. YM Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. YM Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
3. YM Ketua Kamar Pengawas;
4. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung.



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/2121 /PC.01.02/VIII/2019

Jakarta, 6 Agustus 2019

Lampiran : -

Hal : **Penelitian Kepatuhan Hukum pada Tahun 2019**

Yth.

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ✓

Jl. Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Bersama ini kami beritahukan bahwa Ombudsman Republik Indonesia akan kembali menyelenggarakan kegiatan Penelitian Kepatuhan Hukum pada tahun 2019. Pada kegiatan penelitian tersebut, Ombudsman Republik Indonesia akan melakukan penelitian sejumlah berkas perkara untuk melakukan pemetaan sejauhmana Instansi Penegak Hukum yang terlibat dalam penyelesaian proses peradilan pidana telah patuh terhadap ketentuan administratif-teknis. Instansi Penegak Hukum yang akan diteliti adalah (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia, (2) Kejaksaan Republik Indonesia, (3) Pengadilan Negeri, dan (4) Lembaga Pemasyarakatan.


Pada tahun 2019, Ombudsman Republik Indonesia akan melakukan penelitian Kepatuhan Hukum di Pengadilan Negeri yang berada pada 11 (sebelas) provinsi, yakni:

1. Bengkulu
2. Jambi
3. Sumatera Selatan
4. Lampung
5. DKI Jakarta
6. Nusa Tenggara Barat
7. Gorontalo
8. Papua
9. Sulawesi Tengah
10. Sulawesi Tenggara
11. Kalimantan Barat

Adapun prinsip-prinsip penelitian Kepatuhan Hukum adalah sebagai berikut:

- Objek : Produk-produk administratif dalam penanganan tindak pidana umum dan khusus yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Pengadilan Negeri, dan Lembaga Pemasyarakatan
- Metode : Pemeriksaan dokumen
- Variabel dan Indikator : Kesesuaian produk-produk administratif dalam penanganan tindak pidana umum dan tindak pidana khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang terkait
- Output : Kategorisasi Kepatuhan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Pengadilan Negeri, dan Lembaga Pemasyarakatan di predikat kepatuhan tinggi, sedang, dan rendah
- Biaya : Tidak dipungut/dikenakan biaya apapun
- Waktu : September s/d November 2019

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia

Lely Retasari Soebekty, S.P., M.E.